eJournal Ilmu Pemerintahan, 3 (2) 2015: 797-811
ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2015

PARTISIPASI PEMUDA PANCASILA DALAM MEMBANTU PEMERINTAH MENJAGA STABILITAS SOSIAL DI KOTA SAMARINDA

Fey-Fey Tanzil[1]

Abstrak

Fey-Fey Tanzil, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Partisipasi Pemuda Pancasila dalam Membantu Pemerintah Menjaga Stabilitas Sosial di Kota Samarinda di bawah bimbingan Dr. H. Muh. Jamal Amin, M.Si dan Budiman, S.IP, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Pemuda Pancasila dalam Membantu Pemerintah Menjaga Stabilitas Sosial di Kota Samarinda dalam hal peningkatan komunikasi, peningkatan hubungan harmonis dan pelaksanaan program organisasi serta menjelaskan faktor yang mendukung dan penghambat dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan Sidodadi.

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif dengan fokus penelitian dari penelitian ini adalah peningkatan komunikasi masyarakat, peningkatan hubungan dan pelaksanaan program organisasi dalam menjaga stabilitas sosial di Kota Samarinda. Sumber data berasal dari Pengurus yakni Ketua PP Kota Samarinda, Wakil Sekretaris PP Kota Samarinda dan perwakilan dari Dinas Sosial serta adanya beberapa warga di lingkungan Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian adalah penelitian melalui kepustakaan, wawancara dan penelitian langsung kelapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi Pemuda Pancasila dalam membantu Pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti, keterlibatan dalam membantu aparat menjaga keamanan masyarakat, penanggulangan bencana alam seperti banjir, bencana kebakaran, pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Partisipasi Pemuda Pancasila dalam membantu Pemerintah menjaga stabilitas sosial belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan adanya faktor penghambat seperti terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemuda Pancasila. Untuk mewujudkan partisipadi Pemuda Pancasila dalam menjaga stabilitas sosial, menjalin komunikasi dengan berbagai pihak seperti Kepolisian, Pemerintah Kota Samarinda, Organisasi Masyarakat Lainnya dan tentunya masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci *: Partisipasi, Stabilitas*

---

[1] Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. chenvey1826@gmail.com

Pendahuluan

Pengawasan sosial dan keamanan dalam dinamika pemerintahan Indonesia bagaikan kesatuan yang tidak terpisahkan. Hubungan keduanya dapat dilacak dari sejarah awal pembentukan negara ini, dari masa kerajaan, zaman kolonial hingga setelah kemerdekaan. Tarik- menarik pengawasan social dan keamanan berpengaruh kuat terhadap pergeseran fungsi dan peran pemerintah selama ini.

Samarinda merupakan salah satu ibukota di indonesia yang sangat maju di provinsi kalimantan timur, selain itu samarinda juga memiliki kekayaan yang sangat besar yaitu kekayaan tambang. Namun dalam perjalannya banyak pemimpin yang berebut kekuasaan sehingga bisa memperkeruh keamanan yang ada. Kiranya fungsi sosial kontrol keamanan yang *cover both side* tidak akan maksimal dalam memperjelas *track record security* dalam memecahkan permasalahan keamanan secara baik dan kekeluargaan.

Pemuda Pancasila adalah salah satu Organiasi Kemasyarakatan Pemuda di Samarinda, yang anggotanya dari seluruh lapisan masyarakat, tanpa membatasi latar belakang etnis, agama dan profesi. Organisasi ini berbasis pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, yang diharapkan melahirkan kader-kader Pemuda Pancasila yang berwawasan jauh kedepan serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya bangsa, sehingga mampu memahami,dan menyikapi persoalan dan permasalahan bangsa di masa kini dan di masa akan datang. Kemampuan untuk membina organisasi Pemuda Pancasila akan memberikan makna positif bagi dunia kepemudaan, walaupun ada pandangan yang skeptis terhadap organisasi Pemuda Pancasila ini dari masyarakat samarinda dalam hal sosial kontrol keamanan.

Sesusai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila yang memiliki semboyan “Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang” Pemuda Pancasila harus siap dan tidak akan surut dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi baik itu perubahan zaman, politik, sistem pemerintahan, kebijakan pemerintah, globalisasi, maupun penggantian pimpinan nasional (suksesi) sekalipun.

Melihat besarnya komponen proses kerjasama organisasi masayarakat dalam hal keamanan sosial menjalankan tugas dari pembangunan yang terus berlangsung hingga sekarang, maka penting untuk mengartikulasikan kembali tuntutan peran serta ormas PP dalam sosial kontrol keamanan. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai peran ormas PP dalam bentuk penulisan skripsi dengan mengambil judul : Partisipasi Pemuda Pancasila dalam Membantu Pemerintahan Menjaga Stabilitas Sosial di Kota Samarinda.

Selanjutnya rumusan maslah pada penelitian ini adalah BagaimanaPartisipasi Pemuda Pancasila dalam Membantu Pemerintahan Menjaga Stabilitas Sosial di Kota Samarinda. Dan Apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Pemuda Pancasila dalam Membantu Pemerintahan Menjaga Stabilitas Sosial di Kota Samarinda. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk menjelaskan

Partisipasi Pemuda Pancasila dalam Membantu Pemerintahan Menjaga Stabilitas Sosial di Kota Samarinda. Untuk menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi Partisipasi Pemuda Pancasila dalam Membantu Pemerintahan Menjaga Stabilitas Sosial di Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Partisipasi

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46).

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Korten (2008:34) dalam pembahasannya tentang berbagai paradigma pembangunan mengungkapkan bahwa dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat, partisipasi adalah proses pemberian peran kepada individu bukan hanya sebagai subyek melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Sedangkan Migley (2006:62) melihat partisipasi sebagai upaya memperkuat kapasitas individu dan masyarakat untuk mendorong mereka dalam menyelesaikan permasalan yang mereka hadapi.

Bentuk Partisipasi

Tipologi partisipasi (Sumarno, 2004:21) menggambarkan derajat keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi yang didasarkan pada seberapa besar kekuasaan (power) yang dimiliki masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kegunaan dari adanya tipologi partisipasi ini adalah: (a) untuk membantu memahami praktek dari proses pelibatan masyarakat, (b) untuk mengetahui sampai sejauh mana upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan (c) untuk menilai dan mengevaluasi keberhasilan kinerja dari pihak-pihak yang melakukan pelibatan masyarakat.

Tangga partisipasi menurut Arnstein (2009:76)Tangga terbawah merepresentasikan kondisi tanpa partisipasi (non participation), meliputi: (1)

manipulasi (manipulation) dan (2) terapi (therapy). Kemudian diikuti dengan tangga (3) menginformasikan (informing), (4) konsultasi (consultation), dan (5) penentraman (placation), dimana ketiga tangga itu digambarkan sebagai tingkatan tokenisme (degree of tokenism). Tokenisme dapat diartikan sebagai kebijakan sekadarnya, berupa upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan. Jadi sekadar menggugurkan kewajiban belaka dan bukannya usaha sungguh-sungguh untuk melibatkan masyarakat secara bermakna. Tangga selanjutnya adalah (6) kemitraan (partnership), (7) pendelegasian wewenang / kekuasaan (delegated power), dan (8) pengendalian masyarakat (citizen control). Tiga tangga terakhir ini menggambarkan perubahan dalam keseimbangan kekuasaan yang oleh Arnstein dianggap sebagai bentuk sesungguhnya dari partisipasi masyarakat.

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 58), terbagi atas: a) Partisipasi Vertikal. Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. b) Partisipasi horizontal. Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Pendukung dan penghambat Partisipasi Masyarakat

Dengan mengacu pada berbagai referensi (Anon, 2000; Blumenthal, 2000, Dovers, 2000; Kapoor, 2001; serta UNDP, 2000), Thomsen (2003) memaparkan Pendukung dan Penghambat dari partisipasi masyarakat. Keuntungan/Pendukung dari partisipasi masyarakat adalah Partisipasi memperluas basis pengetahuan dan representasi, Partisipasi membantu terbangunannya transparansi komunikasi dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara para stakeholders, Partisipasi dapat meningkatkan pendekatan iteratif dan siklikal dan menjamin bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan local. Sedangkan penghambat atau kerugian yang mungkin muncul dari pendekatan partisipatif adalah. Sedangkan penghambat atau kerugian yang mungkin muncul dari pendekatan partisipatif adalah Proses partisipasi dapat digunakan untuk memanipulasi sejumlah besar warga masyarakat, Partisipasi dapat menyebabkan konflik, Partisipasi dapat menjadi mahal dalam pengertian bahwa waktu dan biaya yang dikeluarkan dipersepsikan sebagai sesuatu yang mahal bagi masyarakat local.

Organisasi Masyarakat

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat menjelaskan organisasi masyarakat adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tujuan yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Sebagai warga masyarakat dan warga negara setiap manusia Indonesia harus memegang semangat kekeluargaan dan semangat gotong-royong. Hal ini berarti bahwa kita sebagai warga negara harus mengadakan organisasi dan saling membantu Negara kita yang berasaskan kekeluargaan, menghormati hak pribadi. Sebaliknya hak pribadi itu dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan bersama yaitu kepentingan nasional. Oleh karena itu, kepentingan nasional yang merupakan kepentingan bersama itu harus didahulukan daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Undang-undang tersebut juga menjelaskan jenis-jenis organisasi masyarakat yaitu: a) Organisasi Formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dan dengan tujuan-tujuan tertentu yang disadari pula dan diatur dengan ketentuan-ketentuan yang formal. Organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawabnya. Struktur yang ada juga menerangkan bagaimana bentuk saluran-saluran melalui apa komunikasi berlangsung. b) Organisasi Informal adalah organisasi yang dibentuk tanpa disadari sepenuhnya, tujuan-tujuannya juga tidak begitu jelas. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) juga tidak jelas. Hubungan yang terjalin juga sifatnya pribadi dan sifatnya tidak formal. Kebanyakan organisasi informal ini terbentuk dalam organisasi formal, yang anggotanya terdiri atas karyawan yang ada pada lembaga tersebut. Mereka secara pribadi ingin mengadakan kegiatan tertentu secara bersama-sama yang harus diorganisir.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang akan dibahas oleh penulis adalah Partisipasi Pemuda Pancasila dalam Membantu Pemerintahan Menjaga Stabilitas Sosial di Kota Samarinda . Faktor – faktor yang mempengaruhi Partisipasi Pemuda Pancasila dalam Membantu Pemerintahan Menjaga Stabilitas Sosial di Kota Samarinda.

Partisipasi Pemuda Pancasila dalam Membantu Pemerintah Menjaga Stabilitas Sosial di Kota Samarinda

Proses pengawasan sosial dan keamanan dalam dinamika pemerintahan yang berkembang adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hubungan keduanya dapat dilacak dari sejarah awal pembentukan negara ini, dari masa kerajaan, zaman kolonial hingga setelah zaman kemerdekaan.Tarik- menarik pengawasan sosial dan keamanan berpengaruh kuat terhadap pergeseran fungsi dan peran pemerintah selama ini.Pemerintah yang seharusnya bekerja melayani dan berpihak kepada rakyat berkembang menjadi melayani penguasa dengan keberpihakan pada politik dan kekuasaan. Sampai saat ini, pengaruh kuat pemerintah terhadap pengawasan sosial membuat sulitnya mesin keamanan dalam memberi pelayanan publik yang profesional, rentan terhadap tarik-menarik kepentingan politik, korupsi, kolusi, nepotisme, dan berbagai penyakit lainnya.

Sementara itu, masyarakat selama ini masih berpandangan bahwa keamanan hanya milik pemerintahan seperti kepolisian, kehakiman dan kejaksaan.

Lembaga Pemuda Pancasila adalah salah satu Organiasi Kemasyarakatan Pemuda di Samarinda, yang anggotanya dari berbagai lapisan masyarakat, tanpa melihat latar belakang etnis, agama dan profesi. Organisasi ini berbasis pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, yang diharapkan melahirkan kader-kader Pemuda Pancasila yang berwawasan jauh kedepan serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya bangsa, sehingga mampu memahami,dan menyikapi persoalan dan permasalahan bangsa di masa kini dan di masa akan datang. Kemampuan untuk membina organisasi Pemuda Pancasila akan memberikan makna positif bagi dunia kepemudaan di Samarinda, walaupun ada pandangan yang skeptis terhadap organisasi Pemuda Pancasila ini dari masyarakat Samarinda dalam hal sosial kontrol keamanan yang melindungi sesuatu hal dengan bayaran/imbalan.

Menjaga Stabilitas Sosial di Kota Samarinda

Menjaga stabilitas sosial lingkungan merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang baik.Salah satu bagian terpenting dalam pemeliharan stabilitas sosial lingkungan adalah partisipasiorganisasi Pemuda Pancasila bersama masyarakat.Dalam hal ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan diwujudkan dalam bentuk kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila, Organisasi tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan moral dan disiplin warga samarinda.

Organisasi PP Samarinda sudah berusaha dengan keras dalam mengusahakan tindakan dan perilaku dalam meningkatkan stabilitas sosial di wilayah kota Samarinda, namun proses partisipasi ke masyarakat belum terlaksana dengan baik dan kurang maksimal dikarenakan minimnya pendanaan untuk mewujudkan proses partisipasimasyarakat akan pentingnya menjaga stabilitas sosial di wilayah kota Samarinda.

Interaksi yang terjalin dalam menjaga stabilitas sosial terjadi dalam masyarakat melibatkan berbagai aspek misalnya pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan dan lain-lain.Khususnya tindakan sosial, keamanan, ketentraman dan ketertiban yang dapat menimbulkan masalah sosial di masyarakat.Masalah sosial, hal keamanan pada dasarnya merupakan masalah semua manusia.Karena tidak ada satu manusiapun yang dapat terbebas dari permasalahan sosial ini.Namun, terkadang ada beberapa orang yang kurang memperhatikan stabilitas sosial sehingga menimbulkan berbagai masalah yang timbul bagi dirinya maupun orang lain disekitarnya.

Prinsip yang kedua menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki potensi komunikasi khususnya Ketua MPC PP Samarinda. Dalam bidang sosial, pihak berkepentingan dalam hal ini Pemuda Pancasila harus paham dengan apa yang dilakukan masyarakat, karena mereka memiliki *body language*. Misalnya, disaat menyampaikan informasi tentang kondisi sesuatu, seorang anggota harus dapat

melihat respon mereka.Apakah mereka senyum, atau diam saja, atau malah menunjukkan muka yang kurang sedap. Dengan demikian dapat diketahui tindakan apa yang dapat dilakukan. Lebih jauh misalnya jika *respon audience* hanya diam saja atau menunjukkan respon yang kurang baik seperti menggerutu, bicara sendiri atau memandang dengan tatapan sinis, mungkin cara penyampaian informasi harus diubah dengan lebih condong kearah mendengarkan keluhan yang mereka utarakan. Selain itu model menjaga stabilitas melalui komunikasi menjadi lebih menarik dan menyenangkan jika penyampaian informasi yang diberikan menjadi lebih efektif dan berguna dan memudahkan pemahaman yang jelas sehingga menjaga stabilitas sosial dengan lancar.

Menjalin dan MenjagaHubungan dengan Pihak Swasta, Pihak Penyelenggaraan Pendidikan, Pihak Keamanan, Pihak Pemerintah serta Organisasi Masyarakat yang Peduli Terhadap Stabilitas Sosial

Menjaga hubungan dengan beberapa pihak berkepentingan seperti pihak swasta, pihak pendidikan, pihak keamanan, pihak pemerintahan serta pihak organisasi masyarakat yang peduli terhadap stabilitas sosial dalam suatu wilayah Kota Samarinda. Sebagai bentuk kepedulian antar pemerintahan Kota Samarinda dan Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila serta hubungan dengan seluruh lapisan masyarakat.

Proses peningkatan hubungan dalam stabilitas sosial bisa dilaksanakan dengan preventif dan represif sehingga pola hubungan yang terjalin dengan beberapa pihak sangat membantu melengkapi komponen yang kurang sehingga proses peningkatan stabilitas sosial bisa berjalan aman dan baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan bersama. Dengan adanya peningkatan produk hukum seperti undang-undang sampai peraturan walikota dalam proses menjaga stabilitas sosial yang ada bisa memberikan efek jera siapa yang mengganggu stabilitas sosial di Samarinda, langkah-langkah terstruktur sejatinya bisa menjaga hubungan yang baik dengan beberapa pihak bisa dilakukan melalui sarana seminar pemuda, dialog masyarakat melalui RT dan diskusi ringan terkait keamanan daerah, ini bermaksud untuk mencari kembali pihak-pihak mana saja yang akan di rangkul dan di jadikan kekuatan dalam proses peningkatan hubungan dalam stabilitas sosial.

Peran Walikota mempunyai tugas pokok menyelanggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan diwilayah kerjanya, secara garis beras Walikota mempunyai peran yang sangat penting yakni melaksanakan pembinaan urusan stabilitas sosialsesuai lingkup tugas dan kewenangannya, melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap petugas pelindung masyarakat di wilayah Kota Samarinda dan melaksanakan pembinaan fasilitas terhadap upaya-upaya yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka menciptakan dan memilihara stabilitas sosialdi wilayah kecamatan dan kelurahan serta menjadi penegak pelaksanaan PERDA keputusan Walikota Samarinda serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Adanya rasa stabilitas yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan menganggu tatanan kehidupan bermasyarakat.Ormas PP Samarinda dituntut untuk secara proaktif melakukan "pembinaan", sehingga tidak hanya "menjaga" agar stabilitas sosial terpelihara tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat, menggugah dan mengajak peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan stabilitas sosial dan bahkan ikut memecahkan masalah-masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan. Tugas-tugas ini dipersembahkan oleh aparatur lainnya untuk membantu (*to support*) masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan rasa tenteram sehingga memungkinkan kebutuhannya akan rasa tertib sehingga memungkinkan tercapainya stabilitas, disamping perannya sebagai penegak hukum (*to control*).

Ormas Pemuda Pancasila dengan Pihak Swasta

Ormas Pemuda Pancasila juga belajar dan memiliki konsep pengelolaan ekonomi yang lebih *holistic*, komprehensiv dan manusiawi serta berkeadilan untuk dapat melihat secara jernih dalam proses menjaga stabilitas sosial, namun hal demikian tidaklah secara otomatis berarti akan membuat stabilitas sosial akan menjadi lebih baik.Fenomena yang ada saat ini memperlihatkan bahwa pihak swasta belum memiliki konsep dan atau pemahaman yang baik tentang apa yang disebut dengan menjaga stabilitas sosial itu sendiri, sehingga akibatnya mereka belum percaya dan belum terdorong untuk memperjuangkannya baik melalui pembuatan undang-undang (regulasi) ataupun dalam mensosialisasikan dan melembagakan dalam kehidupan keseharian mereka.

Dalam hal pembuatan dan atau amandemen undang-undang misalnya, kita belum melihat keseriusan pihak swasta untuk membantu dalam berpartisipasi dalam proses pembuatan perundang-undangan yang berkaitan dengan stabilitas sosial, misalnya saat ini yang sedang digarap oleh DPRD dan Pemerintah adalah peratuan daerah tentang pasar tradisional dan pasar modern. Kehadiran dan partisipasi pihak swasta dalam mensubstansiasi dan menyumbangkan pemikiran bagi penyusunan dan pembahasan RUU tersebut masih sangat jauh dari yang diharapkan. Seperti "tidak adanya" sikap dan langkah-langkah mereka dalam menghadapi praktek-praktek ekonomi yang tidak terpuji seperti terhadap adanya perampasan hak-hak berusaha rakyat kecil, karena tempat-tempat berdagang dan berusaha mereka digusur dan atau dimatikan oleh kehadiran usaha-usaha besar yang lebih bersifat monopolistik yang ada disekitarnya, adanya praktek-praktek ganti rugi terhadap lahan yang dimiliki masyarakat yang sangat tidak berpihak kepada rakyat yang dilakukan oleh para pengembang, tidak adanya lahan yang hendak digarap oleh para petani atau penggarap karena lahan-lahan yang ada

telah dikuasai oleh segelintir orang kaya dan ironisnya tanah tersebut dibiarkan terlantar begitu saja.

Dalam partisipasi kerjasama antara Ormas PP dan pihak swasta masih belum mampu memperlihatkan sikapnya terhadap kehadiran perusahaan-perusahaan asing, terutama dalam bidang pertambangan yang sangat eksploitatif dan merugikan rakyat. Sebagai contoh kita tahu betapa ganasnya perusahaan batubara menguras kekayaan alam Kota Samarinda, sehingga perusahaan hanya mengejar keuntungan saja sehingga untuk menjaga stabilitas sosial yang berkembang di masyarakat sangat sulit dilaksanakan.Agenda kerjasama dengan pihak swasta harus jelas karena proses menjaga stabilitas sosial berjalan beriringan. Perlu diketahui pihak swasta ini adalah perusahaan terbatas baik skala besar maupun kecil, pihak CV, koperasi, usahawan, enterpreuner, advertising, pengelola makanan, pusat berbelanjaan (mall, distro, mart) pusat pengelola hiburan, wiraswasta, dan pihak ekonomi yang mencari keuntungan dengan berbagai cara dalam pemenuhan organisasinya.

Semenjak diberlakukannya pasar bebas, terakhir dengan diberlakukannya perdagangan bebas antara Cina dan Asia Tenggara, yang sangat berdampak buruk terhadap perekonomian Samarinda terutama terhadap pengusaha kecil dan industri-industri rumah tangga karena barang-barang mereka tidak mampu bersaing dengan produk-produk yang datang dari luar yang harganya jauh lebih murah.

Ormas Pemuda Pancasila dengan Pihak Penyelenggaraan Pendidikan

Partisipasi organisasi masyarakat Pemuda Pancasila dengan Pihak Penyelenggaraan Pendidikan (Dinas Pendidikan) dalam menjaga stabilitas sosial salah satunya dalam peningkatan mutu pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah menempati posisi yang penting. Dalam konteks otonomi dan pemberdayaan sekolah, partisipasi organisasi masyarakat harus ditangani dan dibangun secara serius agar tumbuh kesadaran akan pentingnya keterlibatan organisasi masyarakat PP dalam pendidikan. Partisipasi organisasi masyarakat PP dibangun lewat proses penyadaran yang panjang dan strategis untuk mengubah pemikiran bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pihak pendidikan, tetapi juga tanggung jawab ormas PP.

Kondisi ini menuntut kesiapan para pemegang kebijakan dan manajer pendidikan untuk mendistribusi peran dan kekuasaannya agar bisa menampung sumbangan partisipasi masyarakat dalam proses menjaga stabilitas sosial. Sebaliknya dari pihak pendidikan juga harus belajar untuk kemudian bisa memiliki kemauan dan kemampuan menjaga dalam pengembangan pendidikan di Kota Samarinda.

Ormas Pemuda Pancasila dengan Pihak Keamanan

Walaupun pemerintah memiliki peran utama dalam menjalin dan menjaga stabilitas sosial, Ormas Pemuda Pancasila dengan pihak keamanan haruslah

memiliki penghormatan terhadap hak asasi manusia, ormas PP berkepentingan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya tindakan dari pihak penyelenggara keamanan umum, sesuai dengan perlindungan dan peningkatan hak asasi manusia. Jika ada kebutuhan untuk menambah keamanan yang disediakan oleh pemerintah, Ormas PP bisa diminta atau diharapkan untuk memberikan kontribusi, atau mengganti, biaya melindungi fasilitas
dan personil perusahaan yang ditanggung oleh pihak keamanan umum. Meskipun keamanan umum diharapkan bertindak dengan cara yang sesuai dengan hukum lokal dan nasional yang sesuai dengan standar hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional, namun demikian, dalam konteks ini kekerasan bisa saja terjadi.

Dalam usaha mengurangi risiko kekerasan seperti di atas dan untuk meningkatkan penghormatan kepada hak asasi manusia secara umum, kami telah mengidentifikasi prinsip-prinsip sukarela berikut sebagai pedoman untuk menjalin dan menjaga stabilitas sosial antara ormas PP dan pihak keamanan dalam hal keamanan yang disediakan untuk masyarakat di Kota Samarinda: Pertama, Pengaturan Keamanan pemerintah harus berkonsultasi secara teratur dengan pihak keamanan dan organisasi masyarakat setempat mengenai dampak pengaturan keamanan mereka terhadap permasalahan keamanan di masyarakat.

Ormas Pemuda Pancasila dengan Pihak Pemerintah Kota Samarinda

Menjalin stabilitas sosial melalui partisipasi organisasi masyarakat PP dengan pihak pemerintah merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan stabilitas sosial potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan menjaga stabilitas sosial dan peran serta ormas PP dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada pihak pemerintah terhadap program kegiatan yang telah disusun. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat *Community Devlopment* sangat bergantung kepada peranan seluruh stake holder. Tanpa melibatkan masyarakat, ormas PP dan pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil menjaga stabilitas sosial. Stabilitas sosial hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru.

Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, menjaga stabilitas sosial juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi menjaga stabilitas sosial ini penting karena akan menentukan di mana partisipasi ormas PP dengan pihak pemerintah, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergi. Partisipasi

ormas PP dalam menjaga stabilitas sosial berupa subtansi nyata dari ormas PP setempat untuk mengakses potensi sumber daya yang ada di lingkungannya. Sehingga potensi sumber daya yang sangat melimpah ruah itu bisa dijadikan nilai tambahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kota samarinda. Maka bantuan pihak pemerintah berupa *financial* (keuangan), program menjaga stabilitas sosial, dan pelimpahan kewenangan merupakan syarat yang perlu dipenuhi.Partisipasi ormas PP dengan pihak pemerintah dalam rencana menjaga stabilitas sosial harus sudah dimulai sejak saat perencanaan kemudian pelaksanaan dan seterusnya yakni pemeliharaan.

Ormas Pemuda Pancasila dengan Ormas yang Peduli Terhadap Stabilitas Sosial

Merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Siti Irene Astuti D (2011:98), kita dapat melihat bahwa bingkai partisipasi yang ada di Indonesia saat ini pun sama dengan yang digambarkan oleh mereka, begitupula dengan hambatan yang dihadapi. Karenanya, arahan untuk melakukan pembingkaian kembali partisipasi dan melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi hambatan sangat relevan untuk dilakukan dalam konteks Indonesia. Selain itu, apa yang mereka sampaikan pun sangat sejalan dengan pendapat dari para pakar lainnya. Dalam menjalin dan menjaga stabilitas sosial ormas PP dan LSM dan organisasi masyarakat sipil lainnya secara normatif memiliki tugas untuk memediasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat secara langsung.Seringkali, pemerintah tidak mampu melaksanakan seluruh tugasnya untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat karena begitu banyaknya aspek yang harus ditangani.Suaramasyarakat juga seringkali tidak sampai kepada pemerintah, tanpa bantuan “pengeras suara” yang dilaksanakan oleh institusi yang terorganisir baik. Pada titik inilah sebenarnya Ormas PP dan LSM sejenis memainkan peranan strategis dalam mengadvokasi dan menjadi mediator partisipasi masyarakat, yaitu untuk mengisi ruang-ruang yang tidak terjangkau oleh pemerintah, dan juga untuk memperbesar suara masyarakat agar didengarkan oleh pemerintah sekaligus ikut memberikan warna dalam menjaga stabilitas sosial di Kota Samarinda.

Kendala yang paling umum ditemui dalam menjalankan peran mediator partisipasi dan advokasi masyarakat adalah: (1) ketersediaan sumber daya di kalangan ormas yang diakui masih terbatas; (2) ketergantungan sumber pendanaan untuk melaksanakan program advokasi dan mediator partisipasi masyarakat; (3) kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dan penerimaan masyarakat, terutama pada daerah-daerah rural. Juga ada kecenderungan dimana lembaga-lembaga donor memberikan bantuan kepada daerah yang sama sehingga, proses pelaksanaan program yang dilakukan oleh gabungan ormas itu dilakukan berulang-ulang di daerah yang sama. Bentuk apresiasi dalam menjaga stabilitas sosial adalah dengan kesediaan untuk menjadi bagian dalam program advokasi, terutama untuk program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, di sisi lain pihak ormas sejenis sendiri ada kondisi keterbatasan

kapasitas untuk dapat melaksanakan advokasi pada jangka panjang. Hal ini terutama dirasakan oleh beberapa ormas yang melakukan advokasi masyarakat yang terabaikan hak-haknya oleh kepentingan pihak pengusaha atau pemerintah

Peran advokasi mediator partisipasi masyarakat dalam menjalin dan menjaga stabilitas sosial merupakan salah satu cara untuk memperluas jangkauan pemerintah dalam fungsi pelayanan publik. Sebagaimana dipaparkan di atas, keterbatasan aktual yang dihadapi oleh pemerintah ini sebenarnya dapat dilengkapi oleh keterlibatan ormas PP dengan pihak ormas sejenis sebagai institusi yang lebih independen.Ruang ini seharusnya dapat dikembangkan oleh pemerintah secara proaktif.

Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Pemuda Pancasila dalam Membantu Pemerintah Menjaga Stabilitas Sosial di Kota Samarinda

Faktor-faktor pendukung :

Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban memiliki faktor-faktor yang mendukung dalam pengembangan kemampuan Sumber Daya Organisasi Pemuda Pancasila Samarinda dalam menjalankan tugas kegiatan menjaga stabilitas sosial. Dari hasil temuan di lapangan menunjukkan terdapat beberapa faktor tersebut, antara lain : **1)** Fasilitas Penunjang, Dalam konsep fasilitas, sebuah perlengkapan sumber daya manusia ialah adanya alat-alat peraga guna memberikan pemahaman serta memudahkan pelaksanaan kinerja dalam mengatasi semua permasalahan. Di dalam melaksanakan program-program organisasi masyarakat agar mendapatkan hasil yang optimal, sudah tentunya harus didukung oleh fasilitas-fasilitas yang memadai selain SDM yang baik pula. Adapun fasilitas penunjang yang ada di Ormas PP Samarinda antar lain : **a)** Bidang Umum. Keseretariatan PP Samarinda yang *representative* untuk melaksanakan semua kegiatan sosial dengan 1 buah Ruang Ketua Umum, 1 ruang Sekretaris Umum, 1 Ruang Kepala Urusan, 1 buah lobby pada lantai dasarnya sedangkan 1 buah ruang rapat kapasitas 100 orang, 1 buah ruang perpustakaan. **b)** Lapangan Sepakbola yang dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan olahraga selain Sepakbola termasuk event-event yang berkaitan dengan pihak terkait baik untuk kepentingan organisasi maupun untuk masyarakat. **c)** Jalan sebagai salah satu alat transportasi di Kota Samarinda memliki kondisi yang cukup baik mengingat Samarinda dilalui oleh rute jalan propinsi yang menghubungkan Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kota Bontang serta Kota Balikpapan. **d)** Transportasi sebagai alat penggerak yang dilakukan oleh pengurus PP sehingga pelaksaan bisa lebih cepat dan baik, melihat adanya mobil inventaris, adanya kendaraan bermotor roda 2 milik pengurus juga memberikan bantuan yang cukup signifikan dalam menjaga stabilitas sosial.

Faktor-faktor Penghambat :

Dalam proses peningkatan stabilitas sosialtidak selamanya berjalan dengan lancar, tentu ada kendala-kendala yang dialami dalam proses pelaksanaannya,

seperti hasil yang telah diberikan oleh informan baik dari Organisasi PP Samarinda maupun dari pihak pemerintah, kendala-kendala yang ada yaitu : Dana yang dianggarkan terbatas, seperti yang telah diketahui, bahwa anggaran Samarinda pada saat ini mengalami penurunan akibat sumber Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 hanya 268 Milyar padahal tahun sebelumnya yakni tahun 2012 mencapai 271 Milyar, permasalah ini juga berpengaruh terdapat mata anggaran yang dimiliki oleh pihak organisasi PP guna membiayai seluruh belanja operasional organisasi.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan menjaga stabilitas sosial kepada masyarakat yang diberikan Organisasi MPC Pemuda Pancasila Kota Samarinda dikategorikan mejadi tiga hal yaitu :

1. Partisipasi Pemuda Pancasila dalam membantu Pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti, keterlibatan dalam membantu aparat menjaga keamanan masyarakat, penanggulangan bencana alam seperti banjir, bencana kebakaran, pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba dan lain-lain.
2. Partisipasi Pemuda Pancasila dalam membantu Pemerintah menjaga stabilitas sosial belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan adanya faktor penghambat seperti terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemuda Pancasila.
3. Untuk mewujudkan partisipadi Pemuda Pancasila dalam menjaga stabilitas sosial, menjalin komunikasi dengan berbagai pihak seperti Kepolisian, Pemerintah Kota Samarinda, Organisasi Masyarakat Lainnya dan tentunya masyarakat itu sendiri.

Saran

Dalam penyelenggaraan stabilitas sosial di Kota Samarinda bersama Organisasi Masyarakat MPC Pemuda Pancasila Samarinda kepada masyarakat, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar Partisipasi Pemuda Pancasila dalam membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dapat lebih maksimal, Pemuda Pancasila perlu membuat program dan kegiatan secara kontinyu yang disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Samarinda.
2. Perlu peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia ormas Pemuda Pancasila, sehingga dapat lebih berperan dan berpartisipasi secara maksimal dalam membantu Pemerintah Kota Samarinda dalam menjaga stabilitas sosial.
3. Pemuda Pancasila perlu menambah anggaran yang berumber dari Kader Pemuda Pancasila yang banyak berhasil diberbagai bidang. Untuk mendukung program-program Pemuda Pancasila dalam membantu Pemerintah menjaga stabilitas sosial.

Demikian saran-saran yang dapat penulis kemukakan pada penulisan skripsi sebagai tugas akhir ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi para pembaca skripsi sebagai tugas akhir ini.

Daftar Pustaka

Anonim. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat*

Anonim. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009TentangPelayanan Publik*

Arisandi, (2003), Biddle dan Thomas: *Menelaah Peran dalam Perilaku Sosial*, Arginamis, Yogjakarta

Ahmadi. Abu, 2002, *Langkah-Langkah Perbaikan Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta

Barbara. Kozier, 2004, *Perubahan Peran dalam dinamika Organisasi*, Prestasi Jaya, Jakarta

Berelson dan Steiner, 2004. *Mendalami pentingnya organisasi dalam bisnis kehidupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta

DepartemenPendidikandanKebudayaan, 2000, *KamusBesarBahasa Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta

Friedman, Marilyn M. (2002). *Family Organisation. Theory & Practice*. 3/E. Kanfer Ina R.L. (1998) (alih bahasa). Jakarta: EGC

Friedman dan Kanfer, 2007, *Komunikasi Peran dalam Hubungan Komunikasi Sosial Budaya*, Univesitas Indonesia, Jakarta

Herman Ibrahim, 1999, *PemiludanReformasiSistemKepartaian*, Biro Humas DEPDAGRI, Jakarta

Horton dan Hunt, 1993, *Peran-peran dalam Pengendalian Kehidupan Sosial*, Generalisasi Tricakra, Bandung

Linton. Robert, 1996, *Sosial Budaya dan Keseragaman Manusia*, Grafindo Pustaka, Jakarta

Koentjaraningrat, 2004, *Pengendalian Sosial yang Diterapkan BirokrasidalamMasyarakat*, Pupa Dipara, Jakarta

Soekanto, Soejono, 2003,*Penerapan Pengendalian Sosial dalam Hubungan Organisasi*, Citra Persatuan, Jakarta.

Supomo. dkk, 2002, *HukumPemerintah dalam Bingkai KeamananDi Indonesia*, SinarGrafika, Bandung

<u>Sumber Internet:</u>

12 Maret 2014 (22:23) : Janah, Lailia Fatkul. 2009. *Teori Peran* (Online). Tersedia: http://bidanlia.blogspot.com/2009/07/teori-peran.html

14 Maret 2014 (15:34): Mustafa, Hasan. 2009. *Perspektif Dalam Psikologi Sosial*(Online). Tersedia:

http://home.unpar.ac.id/~hasan/PERSPEKTIF%20DALAM%20PSIKOLOGI%20SOSIAL.doc
21 Maret 2014 (22:27): Anonym. 2011. *Role Theory* (Online). Tersedia: http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Role_theory
21 Maret 2014 (22:29): Anonim. 2011. *Teori* (Online). Tersedia: http://id.wikipedia.org/wiki/Teori
21 Maret 2014 (22:18): Iwan. 2010. *Teori Peran* (Online): Tersedia : http://iwansmile.wordpress.com/teori-resolusi-konflik/.
1 April 2014 (12:13): Anonim. 2009. *Teori Peran* (Online) : Tersedia : http://konsultasikehidupan.wordpress.com/2009/05/07/teori-peran-role-theory/.
1 April 2014 (12:54): Badan Awank. 2011. *Perspektif Dalam Psikologi Sosial 4* : Tersedia : http://www.mail-archive.com/kmnu2000@yahoogroups.com/msg06617.html.
3 April 2014 (20:20): Syakira, Gana. 2009. *Teori Peran* (Online). Tersedia: http://syakira-blog.blogspot.com/2009/01/konsep-diri-peran.html
3 April 2014 (20:30): *http://www.papanputih.com/2010/10/apa-itu-organisasi.html*
8 Januari 2014(19:21): http://pemudapancasila04.blogspot.com/2009/01/profile-tokoh-pemuda-pancasila.html
8 Januari 2014(19:43): http://pemudapancasila234.blogspot.com/